

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- E. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
- l. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1 Pendapatan - LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan – LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

BAB IV : Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan dan fisik dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan antara anggaran dengan realisasi yaitu Belanja yang direncanakan sebesar Rp. **39.885.042.668,00** dapat terealisasi sebesar Rp. **38.337.203.455,00** atau **96,12%**, mengalami kenaikan sebesar Rp. **1.967.944.085,00** atau **94,86%** dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp. **36.369.259.370,00**

Secara keseluruhan Capaian Kinerja keuangan dan fisik Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi %	
					Keu	Fisik
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
	BELANJA DAERAH	39.885.042.668,00	38.337.203.455,00	1.547.839.213,00	96.12	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.129.205.362,00	13.576.505.588,00	552.699.774,00	96.09	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	472.423.802,00	411.362.672,00	61.061.130,00	87.07	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp. 411.362.672,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 2 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.787.802,00	379.845.512,00	60.942.290,00	86.17	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.636.000,00	31.517.160,00	118.840,00	99.62	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.785.537.223,00	10.520.731.825,00	264.805.398,00	97.54	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 10.520.731.825,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 2 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.481.649.877,00	10.248.098.831,00	233.551.046,00	97.77	100
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	303.887.346,00	272.632.994,00	31.254.352,00	89.72	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	198.200.000,00	1.800.000,00	99.10	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 198.200.000,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 1 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Kegiatan Admins trasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	198.200.000,00	1.800.000,00	99.10	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.570.748.032,00	1.378.447.004,00	192.301.028	87.76	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 1.378.447.004,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 1 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Kegiatan Admins trasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.910.800,00	432.299.482,00	1.611.318,00	99.63	100
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.136.837.232,00	946.147.522,00	190.689.710,00	83.23	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.496.305,00	1.067.764.087,00	32.732.218,00	97.03	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp. 1.067.764.087,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 2 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	858.326.117,00	827.746.893,00	30.579.224,00	96.44	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.531.688,00	111.006.694,00	524.994,00	99.53	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.638.500,00	129.010.500,00	1.628.000,00	98.75	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.450.691.628,00	15.818.525.486,00	632.166.142,00	96,16	100
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	16.450.691.628,00	15.818.525.486,00	632.166.142,00	96,16	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 15.818.525.486,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 1 Laporan						
Hasil : Tersedianya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						

	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi : Kota Makassar					
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	66.403.300,00	51.371.089,00	15.032.211,00	77.36	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	312.434.060,00	302.083.626,00	10.350.434,00	96.69	100
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	209.907.982,00	206.242.632,00	3.665.350,00	98.25	100
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6.641.047.100,00	6.264.574.614,00	376.472.486,00	94.33	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
5	Pelayanan Informasi Publik	3.184.265.700,00	3.139.986.003,00	44.279.697,00	98.61	100
6	Layanan Hubungan Media	4.312.676.500,00	4.293.118.404,00	19.558.096,00	99.55	100
7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.723.956.986,00	1.561.149.118,00	162.807.868,00	90.56	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.201.931.202,00	7.103.670.224,00	98.260.978,00	98.64	100
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.021.627.950,00	5.970.326.640,00	51.301.310,00	99.15	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 5.970.326.640,00						
Keluaran : 1200 Mbps						
Hasil : Tersedianya Kapasitas Bandwith Pemerintah Prov. Sulsel						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.021.627.950,00	5.970.326.640,00	51.301.310,00	99.15	100
3.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.180.303.252,00	1.133.343.584,00	46.950.668,00	96.02	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp 1.133.343.584,00						
Keluaran : 53 OPD						
Hasil : Tersedianya OPD Dalam Pengeolaan e-Government						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000,00	97.000.000,00	3.000.000,00	97.00	100
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	677.934.252,00	665.337.575,00	12.596.677,00	98.14	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	402.369.000,00	371.006.009,00	31.362.991,00	92.21	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.490.755.480,00	1.302.665.381,00	188.090.099,00	87.38	100
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.490.755.480,00	1.302.665.381,00	188.090.099,00	87.38	100

Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp. 1.302.665.381,00						
Keluaran : Jumlah dokumen 5 Laporan						
Hasil : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	207.801.690,00	158.922.700,00	48.878.990,00	76.48	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	346.081.990,00	314.454.100,00	31.627.890,00	90.86	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	217.702.500,00	193.502.326,00	24.200.174,00	88.88	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	184.674.600,00	152.661.555,00	32.013.045,00	82.67	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
5	Pengembangan Infrastruktur	361.384.900,00	347.684.900,00	13.700.000,00	96.21	100
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	173.109.800,00	135.439.800,00	37.670.000,00	78.24	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	612.458.996,00	535.836.776,00	76.622.220,00	87.49	100
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	425.538.544,00	371.981.188,00	53.557.356,00	87.41	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp. 371.981.188,00						
Keluaran : Jumlah 6 Area						
Hasil : Tersedianya Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Makassar						
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	211.551.392,00	186.784.893,00	24.766.499,00	88.29	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	74.015.776,00	54.183.100,00	19.832.676,00	73,20	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	139.971.376,00	131.013.195,00	8.958.181,00	93,60	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	186.920.452,00	163.855.588,00	23.064.864,00	87,66	100
Masukan : Jumlah Dana yang digunakan Rp. 163.855.588,00						
Keluaran : Jumlah 3 Layanan						

Hasil : Tersedianya Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah						
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi : Kota Makassar						
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	186.920.452,00	163.855.588,00	23.064.864,00	87.66	100
Realisasi disesuaikan dengan SPD yang terbit						

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah, realisasi anggaran disesuaikan dengan Surat Penyediaan Dana yang tersedia.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1.1 BELANJA

Tahun 2022		%
Anggaran	Realisasi	
39.885.042.668.00	38.337.203.455,00	96.12
Tahun 2021		%
Anggaran	Realisasi	
37.879.934.437.00	36.369.259.370.00	96.01

Informasi Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah direncanakan sebesar **Rp. 39.885.042.668.00** sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 38.337.203.455,00** atau **96,12%**, yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.547.839.213.00** Tidak terserapnya belanja tersebut disebabkan oleh adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan.
tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja	39.885.042.668,00	38.337.203.455,00	96.12	36.369.259.370,00
	Jumlah	39.885.042.668,00	38.337.203.455,00	96.12	36.369.259.370,00

3.1.1.1 Belanja Operasi

Tahun 2022		Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
37.682.033.918,00	36.218.764.813,00	35.566.112.370,00

Belanja Operasi direncanakan sebesar **Rp. 37.682.033.918,00** dapat direalisasikan **Rp. 36.218.764.813,00** atau **96,12%**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.463.269.105,00**.
Belanja operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	10.481.649877,00	10.248.098.831,00	97,77	11.124.792.576,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.384.041,00	22.970.665.982,00	94,92	22.601.319.794,00
3.	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	1.840.000.000,00
	Jumlah	37.682.033.918,00	36.218.764.813,00	96,12	35.566.112.370,00

3.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2022		Tahun 2021	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
10.481.649.877,00	10.248.098.831,00	11.452.466.789,00	11.124.792.576,00

Belanja Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 sebesar **Rp. 10.481.649.877,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 10.248.098.831,00** atau **97,77%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 233.551.046,00**

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Gaji &Tunjangan	6.120.742.929,00	5.959.994.074,00	97,37	6.034.130.496,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	4.360.906.948,00	4.288.104.757,00	98,33	5.090.662.080,00
Jumlah		10.481.649.877,00	10.248.098.831,00	97,77	11.137.878.205,00

3.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2022		Tahun 2021	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
24.200.384.041,00	22.970.665.982,00	23.762.012.648,00	22.601.319.794,00

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 24.200.384.041,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 22.970.665.982,00** atau **94,92%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.229.718.059,00**. Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.718.499.979,00	2.444.257.678,00	89,91	1.364.569.950,00
2	Belanja Jasa Kantor	16.795.251.284,00	16.663.214.933,00	99,21	18.936.653.492,00
3	Belanja luran Jaminan/ Asuransi	54.370.378,00	17.779.542,00	32,70	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	210.000.000,00	207.174.840,00	98,65	14.800.000,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	0,00	0,00	0,00	99.489.500,00
6	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	95.000.000,00	93.001.380,00	97,90	0,00
7	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	34.500.000,00	92,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan	915.010.000,00	900.334.000,00	98,40	542.837.056,00

9	Belanja Perjalanan Dinas	3.374.752.400,00	2.610.403.609,00	77,35	1.623.969.796,00
10	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Jumlah		24.200.384.041,00	22.970.665.982,00	94,92	22.601.319.794,00

3.1.1.1.2.1 Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	466.806.000,00	411.791.600,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	71.830.000,00	75.875.000,00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.591.729,00	0,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	307.448.445,00	238.539.400,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	264.974.400,00	97.871.200,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.224.000,00	0,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	97.535.986,00	0,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.315.900,00	27.880.250,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	26.999.997,00	9.250.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	966.520.000,00	402.812.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	161.771.222,00	84.050.500,00
12	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.239.999,00	0,00
13	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	16.500.000,00
Jumlah		2.444.257.678,00	1.364.569.950,00

3.1.1.1.2.2 Belanja Jasa

Belanja Jasa			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.800.000,00	34.350.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	888.934.100,00	1.408.405.120,00
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	595.449.298,00	20.800.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.990.512,00	37.990.512,00
5	Belanja Jasa Tenaga Supir	75.981.024,00	75.981.024,00
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi	1.083.600.000,00	1.063.200.000,00

	dan Teknologi		
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	346.185.000,00	547.749.000,00
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.706.799.825,00	10.360.090.000,00
9	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	631.953.000,00	2.302.051.000,00
10	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	4.147.281.704,00	2.940.246.206,00
11	Belanja Tagihan Listrik	0,00	44.318.695,00
12	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.992.470,00	10.920.935,00
13	Belanja Lembur	28.248.000,00	10.051.000,00
14	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	58.000.000,00
15	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	22.500.000,00
Jumlah		16.663.214.933,00	18.936.653.492,00

3.1.1.1.2.3 **Belanja luran Jaminan/ Asuransi**

Belanja luran Jaminan/ Asuransi			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.001.942,00	0,00
2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	345.600,00	0,00
3	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	432.000,00	0,00
Jumlah		17.779.542,00	0,00

3.1.1.1.2.4 **Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi**

Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	159.162.900,00	9.250.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	48.011.940,00	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	5.550.000,00
Jumlah		207.174.840,00	14.800.000,00

3.1.1.1.2.5 **Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi**

Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	99.489.500,00
Jumlah		0,00	99.489.500,00

3.1.1.1.2.6 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	93.001.380,00	0,00
Jumlah		93.001.380,00	0,00

3.1.1.1.2.7 Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Kursus/ Pelatihan	34.500.000,00	0,00
Jumlah		34.500.000,00	0,00

3.1.1.1.2.8 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	121.160.000,00
2	Belanja Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	267.180.000,00	97.605.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	39.475.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	49.670.000,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	169.771.536,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	529.462.000,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.022.000,00	39.499.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	6.357.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	64.991.520,00
10	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	3.978.000,00
Jumlah		900.334.000,00	542.837.056,00

3.1.1.1.2.9 Belanja Perjananan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.552.943.609,00	1.618.639.796,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.460.000,00	5.330.000,00
Jumlah		2.610.403.609,00	1.623.969.796,00

3.1.1.1.2.10 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	19.000.000,00
Jumlah		2.472.062.355,00	1.386.838.750,00

3.1.1.1.3 Belanja Hibah

Tahun 2022		Tahun 2021	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00

Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** atau **100%**

Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	1.840.000.000,00
Jumlah		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	1.840.000.000,00

3.1.1.2 Belanja Modal

Tahun 2022		Tahun 2021	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.203.008.750,00	2.118.438.642,00	825.455.000,00	803.147.000,00

Belanja Modal pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 2.203.008.750,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 2.118.438.642,00** atau **96,16%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 84.570.108,00**

Rincian belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.435.728.750,00	1.366.656.842,00	95,19	469.147.000,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	396.860.000,00	99,22	0,00
4.	Belanja Modal Aset Lainnya	367.280.000,00	354.921.800,00	96,64	150.000.000,00
	Jumlah	2.203.008.750,00	2.118.438.642,00	96,16	803.147.000,00

3.1.1.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Tahun 2022		Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.435.728.750,00	1.366.656.842,00	469.147.000,00

Belanja peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 1.435.728.750,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 1.366.656.842,00** atau **95,19%**.

Rincian belanja Peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.612.950,00	53.256.550,00	81,17	85.765.000,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	419.914.800,00	404.734.812,00	96,38	257.060.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Belanja Modal komputer	950.201.000,00	908.665.480,00	95,63	116.322.000,00
	JUMLAH	1.435.728.750,00	1.366.656.842,00	95,19	469.147.000,00

3.1.1.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan

Tahun 2022		Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
0,00	0,00	184.000.000,00

Belanja gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tidak anggarkan pada tahun Anggaran 2022.

Rincian belanja gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00

3.1.1.2.3 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022		Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
400.000.000,00	396.860.000,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 400.000.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 396.860.000,00** atau **99,22%**.

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi	400.000.000,00	396.860.000,00	99,22	0,00
	JUMLAH	400.000.000,00	396.860.000,00	99,22	0,00

3.1.1.2.4 Belanja Aset Lainnya

Tahun 2022		Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	Realisasi
367.280.000,00	354.921.800,00	150.000.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 367.280.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 354.921.800,00** atau **96,64%**.

Rincian belanja Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	367.280.000,00	354.921.800,00	96,64	150.000.000,00
	JUMLAH	367.280.000,00	354.921.800,00	96,64	150.000.000,00

3.1.2 BEBAN– LO

Tahun 2022	Tahun 2021
39.215.945.301,53	32.109.871.669,58

Beban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 39.215.945.301,53** Beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Operasi	36.320.351.029,00	29.671.421.406,00
Jumlah		36.320.351.029,00	29.671.421.406,00

3.1.2.1 Beban Operasi

Tahun 2022	Tahun 2021
36.320.351.029,00	29.671.421.406,00

Beban Operasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 36.320.351.029,00**. Beban operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Pegawai	10.293.136.548,00	10.963.704.312,00
2.	Beban Barang & Jasa	23.027.214.481,00	16.867.717.094,00
3.	Beban Hibah	3.000.000.000,00	1.840.000.000,00
Jumlah		36.320.351.029,00	29.671.421.406,00

Terdapat perbedaan antara beban operasi di Laporan Operasional dengan belanja operasi di Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 101.586.216,00** dimana Beban Operasi sebesar Rp. **36.320.351.029,00** sedangkan Belanja Operasi sebesar Rp. **36.218.764.813,00**. Selisih tersebut sebagai berikut:

- Terdapat Beban persediaan Tahun Lalu sebesar Rp. **19.827.200,00** periode 31 Desember 2021 yang sudah terpakai.
- Terdapat Beban persediaan sebesar Rp. **12.724.023,00** periode 31 Desember 2022 yang belum terpakai (*stok opname terlampir*).
- Terdapat Realisasi beban Utang Tambahan Penghasilan Tahun Lalu sebesar Rp. **341.757.238,00** periode 31 Desember 2021 berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
- Terdapat beban Tambahan Penghasilan sebesar Rp. **386.794.955,00** periode 31 Desember 2022 berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
- Terdapat beban Iuran Jaminan/ Asuransi sebesar Rp. **28.743.822,00** periode 31 Desember 2022.
- Terdapat Reklasifikasi Asset sebesar Rp. **20.701.500,00** periode 31 Desember 2022.

3.1.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2022	Tahun 2021
10.293.136.548,00	10.963.704.312,00

Beban Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. **10.293.136.548,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	5.959.994.074,00	5.998.847.155,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	4.333.142.474,00	4.964.857.157,00
Jumlah		10.293.136.548,00	10.963.704.312,00

3.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2022	Tahun 2021
23.027.214.481,00	16.867.717.094,00

Beban Barang dan Jasa merupakan nilai beban Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 23.027.214.481,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban barang	2.472.062.355,00	1.386.838.750,00
2	Beban jasa	17.044.414.517,00	13.295.071.492,00
3	Beban Pemeliharaan	900.334.000,00	542.837.056,00
4	Beban perjalanan dinas	2.610.403.609,00	1.623.969.796,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	19.000.000,000
Jumlah		23.027.214.481,00	16.867.717.094,00

3.1.2.1.2.1 Beban Barang

Beban Barang Pakai Habis			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	466.806.000,00	411.791.600,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	71.830.000,00	75.875.000,00
3	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.591.729,00	0,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	314.551.622,00	260.808.200,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	264.974.400,00	97.871.200,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.224.000,00	0,00

7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	97.535.986,00	0,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.315.900,00	27.880.250,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.701.500,00	0,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	26.999.997,00	9.250.000,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	966.520.000,00	402.812.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	161.771.222,00	84.050.500,00
13	Beban Pakaian Batik Tradisional	9.239.999,00	0,00
14	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	16.500.000,00
Jumlah		2.472.062.355,00	1.386.838.750,00

3.1.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa Kantor			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.800.000,00	34.350.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	888.934.100,00	1.408.405.120,00
3	Beban Jasa Tenaga Ahli	595.449.298,00	20.800.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	37.990.512,00	37.990.512,00
5	Beban Jasa Tenaga Supir	75.981.024,00	75.981.024,00
6	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.083.600.000,00	1.063.200.000,00
7	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	346.185.000,00	547.749.000,00
8	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.706.799.825,00	6.403.340.000,00
9	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	631.953.000,00	1.003.225.000,00
10	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.147.281.704,00	2.560.240.206,00
11	Beban Tagihan Listrik	0,00	44.318.695,00
12	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	12.000.000,00
13	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.992.470,00	10.920.935,00
14	Beban Lembur	28.248.000,00	10.051.000,00
15	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	40.000.000,00
16	Beban Sewa Audio Visual	0,00	22.500.000,00
Jumlah		16.663.214.933,00	13.295.071.492,00

3.1.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	121.160.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	267.180.000,00	97.605.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	39.475.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	49.670.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	169.771.536,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	529.462.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.022.000,00	39.499.000,00
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	6.357.000,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	64.991.520,00
10	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	3.978.000,00
Jumlah		900.334.000,00	542.837.056,00

3.1.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.552.943.609,00	1.618.639.796,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.460.000,00	5.330.000,00
Jumlah		2.610.403.609,00	1.623.969.796,00

3.1.2.1.2.5 Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	19.000.000,00
Jumlah		2.472.062.355,00	1.386.838.750,00

3.1.2.1.3 Beban Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
3.000.000.000,00	1.840.000.000,00

Beban Hibah merupakan nilai beban Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Hibah	3.000.000.000,00	1.840.000.000,00
Jumlah		3.000.000.000,00	1.840.000.000,00

3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2022	Tahun 2021
2.895.594.272,53	2.438.450.263,58

Beban penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 Rp. 2.895.594.272,53 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.293.472.430,86	2.430.170.129,89
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	3.892.133,73
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.536.866,67	4.387.999,96
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	596.584.975,00	0,00
Jumlah		2.895.594.272,53	2.438.450.263,58

3.1.3 ASET

31 Desember 2022	31 Desember 2021
6.691.260.819,18	9.123.312.897,87

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara kerana alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Lancar	12.724.023,00	19.827.200,00
2	Aset Tetap	5.795.634.187,84	6.326.348.297,87
3	Aset Lainnya	882.902.608,34	2.777.137.400,00
Jumlah		6.691.260.819,18	9.123.312.897,87

3.1.3.1 Aset lancar

31 Desember 2022	31 Desember 2021
12.724.023,00	19.827.200,00

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya dan persediaan. Nilai Aset Lancar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. **12.724.023,00** dan Rp. **19.827.200,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Persediaan	12.724.023,00	19.827.200,00
Jumlah		12.724.023,00	19.827.200,00

3.1.3.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

3.1.3.1.2 Persediaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
12.724.023,00	19.827.200,00

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **12.724.023,00** (*daftar opname persediaan terlampir*). Pada Posisi 31 Desember 2022 terjadi penurunan saldo persediaan sebesar Rp. **7.103.177,00** dari posisi persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **19.827.200,00** Persediaan terdiri dari persediaan bahan pakai habis, bahan pakai habis adalah bahan yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan bahan pakai habis terdiri atas Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Persediaan ATK	12.724.023,00	19.827.200,00
Jumlah		12.724.023,00	19.827.200,00

3.1.3.2 Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.795.634.187,84	6.326.348.297,87

Aset tetap adalah aset berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **5.795.634.187,84** dan 2021 sebesar Rp. **6.326.348.297,87** dengan rincian sebagai berikut:

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.2.1 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
20.582.138.428,00	18.704.292.286,00

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 20.582.138.428,00** yang terdiri dari:

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.2.1.1 Alat-alat Angkutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
3.095.172.300,00	2.830.836.000,00

Alat-alat Angkutan Merupakan nilai Alat-alat angkutan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	2.830.836.000.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2021	Rp.	0.00
Mutasi Aset bertambah	Rp.	264.336.300.00
Jumlah	Rp.	3.095.172.300.00

- *Mutasi Aset Alat Angkutan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan BAST No. 024/13334/BKAD Tgl. 23 Desember 2022 Rp. 247.400.000,00*
- *Mutasi Aset Alat Angkutan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan BAST No. 032/7270/BKAD Tgl. 05 September 2022 Rp. 16.936.300,00*

3.1.3.2.1.2 Alat Bengkel dan Alat Ukur

31 Desember 2022	31 Desember 2021
92.400.000,00	92.400.000,00

Alat bengkel dan alat ukur Merupakan nilai Alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	92.400.000,00
Jumlah	Rp.	92.400.000,00

3.1.3.2.1.3 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
6.145.885.650,00	5.815.783.100,00

Alat-alat kantor dan rumah tangga Merupakan nilai Alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	5.815.783.100,00
Mutasi bertambah	Rp.	330.102.550,00
Jumlah	Rp.	6.145.885.650,00

3.1.3.2.1.4 Alat-Alat Studio dan Komunikasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
2.951.146.552,00	2.645.680.950,00

Alat-alat studio dan komunikasi Merupakan nilai Alat-alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	2.645.680.950,00
Mutasi bertambah	Rp.	467.189.412,00
Mutasi Berkurang	Rp.	(161.723.810,00)
Jumlah	Rp.	2.951.146.552,00

3.1.3.2.1.5 Komputer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
8.297.533.926,00	7.319.592.236,00

Komputer Merupakan nilai Komputer per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	7.319.592.236,00
Mutasi bertambah	Rp.	977.941.690,00
Jumlah	Rp.	8.297.533.926,00

3.1.3.2.1 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
199.500.000,00	334.870.000,00

Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	334.870.000,00
Mutasi bertambah	Rp.	199.500.000,00
Mutasi berkurang	Rp.	(334.870.000,00)
Jumlah	Rp.	199.500.000,00

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.2.2 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
242.874.000,00	105.010.000,00

Jalan, Irigasi dan Jembatan Merupakan nilai Jalan dan Jembatan, Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **242.874.000,00** yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	105.010.000,00
Mutasi bertambah	Rp.	137.864.000,00
Jumlah	Rp.	242.874.000,00

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.2.2.2 Instalasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
172.364.000,00	34.500.000,00

Instalasi merupakan nilai instalasi per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	34.500.000,00
Mutasi bertambah	Rp.	137.864.000,00
Jumlah	Rp.	172.364.000,00

3.1.3.2.2.3 Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
70.510.000,00	70.510.000,00

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	70.510.000,00
Mutasi bertambah	Rp.	.00
Jumlah	Rp.	70.510.000,00

3.1.3.2.3 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.000.000,00	5.000.000,00

Aset tetap lainnya merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **5.000.000,00** yaitu:

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

Buku dan Perpustakaan

Buku dan perpustakaan merupakan nilai buku dan perpustakaan per 31 Desember 2022 yaitu:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	5.000.000,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2022	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	5.000.000,00

3.1.3.2.4 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(15.233.878.240,16)	(12.822.823.988,13)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 15.233.878.240,16** terdiri dari :

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Akumulasi Penyusutan)

3.1.3.2.5.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(15.188.572.581,82)	(12.769.617.896,30)

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	12.769.617.896,30
Mutasi bertambah	Rp.	2.612.624.464,23
Mutasi berkurang	Rp.	(193.669.778,71)
Jumlah	Rp.	15.188.572.581,82

3.1.3.2.5.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0.00	16.597.133.73

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	16.597.133.73
Mutasi berkurang	Rp.	(16.597.133.73)
Jumlah	Rp.	0.00

3.1.3.2.5.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(45.305.658,34)	(36.608.958,10)

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	36.608.958,10
Mutasi bertambah	Rp.	8.768.574,91
Mutasi kurang	Rp.	(71.874,67)
Jumlah	Rp.	45.305.658,34

3.1.3.3 Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
882.902.608,34	2.777.137.400.00

Aset Lainnya merupakan nilai asset lainnya per 31 Desember 2022 yaitu :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	2.777.137.400,00
Mutasi bertambah	Rp.	(1.703.234.791,66)
Mutasi berkurang	Rp.	(191.000.000,00)
Jumlah	Rp.	882.902.608,34

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.3.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
3.132.059.200.00	2.777.137.400.00

Aset tak berwujud merupakan nilai asset tak berwujud per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	2.777.137.400.00
Mutasi bertambah	Rp.	545.921.800.00
Mutasi berkurang	Rp.	(191.000.000.00)
Jumlah	Rp.	3.132.059.200.00

3.1.3.3.2 Aset Lain-Lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
8.000.000,00	8.000.000,00

Aset lain-lain merupakan nilai asset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.000.000,00 yaitu:

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.3.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(8.000.000,00)	(8.000.000,00)

Akumulasi penyusutan Aset Lainnya merupakan nilai Akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.000.000,00 yaitu:

Terlampir pada Tabel ..(Kertas Kerja Aset)

3.1.4 KEWAJIBAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
415.538.777,00	341.757.238,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kewajiban Jangka Pendek	415.538.777,00	341.757.238,00
Jumlah		415.538.777,00	341.757.238,00

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

31 Desember 2022	31 Desember 2021
415.538.777,00	341.757.238,00

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	341.757.238,00
Realisasi Utang Beban Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	(341.757.238,00)
Utang Beban Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	386.794.955,00
Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp.	24.909.822,00
Utang Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN	Rp.	1.704.000,00
Utang Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	2.130.000,00
Jumlah	Rp.	415.538.777,00

3.1.5 EKUITAS

31 Desember 2022	31 Desember 2021
31.907.047.966,99	27.588.711.388,83

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp.	(27.588.711.388,83)
Surplus/Defisit LO T.A. 2022	Rp.	(39.215.945.301,53)
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Mendasar :		
- Rekening Konsolidasi (RK)	Rp.	36.370.267.048,70
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	179.913.291,33
- Koreksi Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	(1.652.571.616,66)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan - Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	34.897.608.723,37
Jumlah Ekuitas - LPE	Rp.	(31.907.047.966,99)

RK PPKD

- SP2D-LS	Rp.	24.730.563.924.00
- SP2D UP/GU/TU	Rp.	13.751.468.010.00

Jumlah Penerimaan RK PPKD	Rp.	38.482.031.934.00
---------------------------	------------	--------------------------

Pengeluaran RK PPKD		
- Pengembalian Sisa Kas	Rp.	144.828.479.00

Jumlah Pengeluaran RK PPKD	Rp.	(144.828.479.00)
----------------------------	-----	------------------

Jumlah RK PPKD	Rp.	38.182.770.009.17
-----------------------	------------	--------------------------

Jumlah Ekuitas Akhir Neraca	Rp.	31.907.047.966.99
------------------------------------	------------	--------------------------

3.2 Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

3.2.1 Utang Beban

Utang beban timbul sehubungan dengan penerapan basis akruaI atas belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan luran Jaminan/ Asuransi pada periode Desember 2022 yang terdiri dari :

JENIS UTANG	SALDO	KET.
1. Utang Beban Tambahan Penghasilan	386.794.955,00	Beban Periode Desember 2022
2. Utang Beban luran Kesehatan Non ASN	24.909.822,00	Beban Periode Desember 2022
3. Utang Beban luran JKK	1.704.000,00	Beban Periode Desember 2022
4. Utang Beban luran JKM	2.130.000,00	Beban Periode Desember 2022
JUMLAH	415.538.777,00	

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel (Diskominfo-SP) berlokasi di Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar, Tlp. 0411-453203 Fax 0411-453489. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sul-Sel No. 83 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyiapkan, dan memfasilitasi pelayanan teknis operasional dan administratif untuk mendukung Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di semua bidang, maka dapat disampaikan susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - Kepala Sub. Bagian Program
 - Kepala Sub. Bagian Umum, Kepagawaian dan Hukum
 - Kepala Sub. Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
5. Kepala Bidang Statistik
6. Kepala Bidang Persandian
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2 Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel merupakan amanah UU 23/2014 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel diatur secara umum dalam UU 23/2014 yang termuat dalam pasal 4:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;
 - h. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian, dan Layanan e-Government;
 - i. Menyenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;
 - j. Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 - k. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah;
 - l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan aplikasi informatika di lingkungan pemerintah Daerah;
 - m. Menyenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah;
 - n. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup Provinsi;
 - o. Menyenggarakan fasilitasi dan pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyiaran daerah;
 - p. Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Sumber Daya SKPD

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris Dinas, 4 orang Kepala Bidang, 77 orang staf yang profesional dibidangnya masing-masing, dengan strata sebaran pendidikan (SLTP) 3 orang, (SLTA) 12 orang, (DIII) 3 orang, Strata 1 (S1) 50 orang dan Strata 2 (S2) 15 orang dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

4.4 Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah harus berperan dan berkarya agar konsisten dan dapat eksist, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada batasan tersebut, adapun visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Informasi untuk Sulsel lebih Maju, Mandiri dan Modern"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi yang merupakan acuan angka-angka yang akan dilakukan, yakni Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi public
- c. Mewujudkan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Persandian

4.5 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2022 yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3.) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1). Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1). Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2). Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Penyelenggaraan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1). Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1). Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi

2). Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

BAB V

PENUTUP

Catatan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022.

Makassar, Januari 2023

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL
SEKRETARIS,

ERWIN WERianto, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780102 199612 1 001